**Laporan Keanggotaan**

**PT. Bogatama Marinusa (Bomar)**

**Dalam Seafood Savers**

Ringkasan Pelaksanaan

Tahapan *Aquaculture Improvement Program* (AIP)

PT. Bogatama Marinusa (Bomar)

Juni – Desember 2021

**Amriana – Fasilitator Program Perbaikan Perikanan Budidaya- WWF Indonesia**

**Informasi Umum**

PT Bogatama Marinusa (Bomar) merupakan salah satu sektor industri perikanan di Sulawesi Selatan yang bergerak dalam bisnis di bidang pengolahan dan pembekuan udang. PT. Bomar mengolah udang jenis windu dan vannamei dari beragam ukuran (size) yang diperoleh dari pengumpul-petambak di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Dalam sehari PT. Bomar memperoleh bahan baku berkisar 300 - 3000 kg perhari.

Sejak April 2017, PT. Bomar mulai mengambil inisiatif untuk berkontribusi dalam perbaikan perikanan di Indonesia. Perusahaan yang awalnya terjun dalam bisnis budidaya dan *hatchery* (pembenihan) udang, khususnya udang windu (*black tiger shrimp*) dan udang vannamei ini bertekad untuk mengelola budidaya udang secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Setelah melewati proses aplikasi yang terdiri dari tahap penilaian dan perbaikan sejak Januari 2017, PT. Bomar pun bergabung dalam program Seafood Savers – WWF-Indonesia dengan mendaftarkan tambak mitra-nya seluas 63,45 hektar yang terletak di Kelurahan Pallameang, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang. Tambak tersebut H. Tantang, yang mengontrol seorang pemimpin tambak dan 10 pekerja tambak.

Melalui keanggotaan Seafood Savers, perusahaan yang berlokasi di Jalan Kima Raya 2 Kav. N-4 B1 Makassar ini mengimplementasikan program perbaikan budidaya atau *Aquaculture Improvement Program* bagi petambak udang windu dengan dampingan dari tim *aquaculture* WWF-Indonesia. Perbaikan akan mencakup aspek lingkungan dan sosial pada operasional PT. Bomar sesuai dengan aspek yang menjadi penilaian sertifikasi ekolabel *Aquaculture Stewardship Council (*ASC*).*

Secara umum, PT. Bomar sudah menerapkan metode untuk menjaga kualitas udang sejak masa panen di tambak. Udang yang dipanen langsung ditempatkan dalam coolbox/Streofoam yang telah diisi serbuk es, sehingga udang terjaga kesegarannya hingga tiba di pabrik pengolahan di Makassar. Selain itu, produk olahan PT. Bomar dikirim menggunakan container/tonase yang dilengkapi mesin pendingin, sehingga produk olahan menjadi beku dan terjaga kualitasnya selama masa pengangkutan ke tempat tujuan.

**Profil Aquaculture Improvement Program (AIP)**

**Lokasi Tambak-Tambak *Supply Chain* PT. Bogatama Marinusa (Bomar) per Desember 2018**

Lokasi : Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattirosompe, Pinrang

Jumlah Petambak : 10 Orang

Tabel 1. Status tambak AIP PT. Bomar per Desember 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Lokasi Tambak** | **Luas Tambak (Ha)** |
| 1 | Jamal | Pallameang | 11.08 |
| 2 | Kadir | Pallameang | 5.28 (2 petak) |
| 3 | Mansyur | Pallameang | 4.97 |
|  | Mansyur | Pallameang | 7.02 |
| 4 | Saka | Pallameang | 9.91 |
| 5 | Sultan | Pallameang | 11.57 |
| 6 | Umar | Pallameang | 7.13 |
| 10 | H. Maming | Pemimpin Petambak | **56,96** |

Catatan:

* H. Maming adalah pemimpin petambak yang terdiri atas 7 petambak, yang menjaga 9 petak tambak.
* Tambak yang dikelola Rizal dan Amir tidak lagi menjadi wewenang H. Tantang, karena sudah lepas sewa. Sedangkan Tamrin sudah tidak dipekerjakan lagi oleh H. Tantang, sehingga, tambaknya dikelola oleh Mansyur. Saat ini luas tambak secara keseluruhan adalah **56,96** hektar.

**Lokasi Tambak-Tambak *Supply Chain* PT. Bogatama Marinusa (Bomar) per Agustus 2020**

Lokasi : Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattirosompe, Pinrang

Jumlah Petambak : 6 Orang

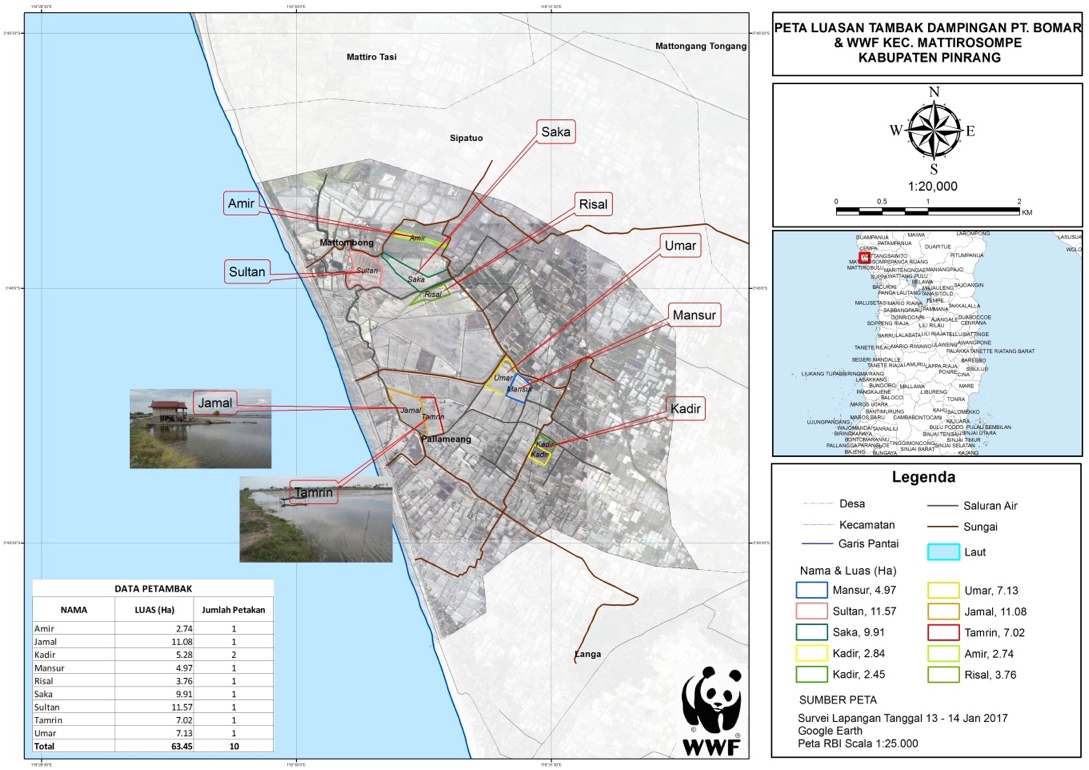
Tabel 2. Status tambak AIP PT. Bomar per Agustus 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Lokasi Tambak** | **Luas Tambak (Ha)** |
| 1 | Jamal => H. Maming | Pallameang | 11.08 => 11.27 |
| 2 | Kadir => Amir | Pallameang | 5.49 (2 petak) => 6 (1 petak) |
| 3a | ~~Mansyur~~ => Umar | Pallameang | 4.97 => 4.74 |
| 3b | Umar | Pallameang | 7.13 |
| 4 | Mansur | Pallameang | 7.02 => 6.83 |
| 5 | Saka | Pallameang | 9.91 (2 petak) => 6.68 (1 petak) |
| 6 | Sultan | Pallameang | 11.57 => 11.38 |
| **TOTAL** | | | **53,42** |

Catatan: Setelah dilakukan pengukuran ulang sesuai dengan titik koordinat per Agustus 2020, perubahan luasan tambak AIP PT. Bomar pada umumnya tidak mengalami banyak perubahan. Yang mengalami perubahan hanya pada beberapa pekerja tambak yang bertukar tambak dan terjadi pengurangan luasan tambak yang dikerja oleh Saka dari 9.91 hektar menjadi 5 hektar karena 4.91 hektar tidak dikontrakkan Kembali oleh pemilik tambak kepada H. Tantag/H. Maming. Sehingga, luas tambak AIP saat ini secara keseluruhan adalah **53,42** hektar.

**Peta Lokasi Tambak-Tambak Mitra PT. Bomar**

A picture containing map

Description automatically generated****

Peta 1a. Tambak-tambak mitra PT. Bomar Tahun 2017 (56.95 ha) Peta 1b. Tambak-tambak mitra PT. Bomar Tahun 2020 (53.42 ha)

**Praktik Budidaya**

Nama Komoditas : Udang Windu

Metode Budidaya : Budidaya tambak tradisional

Harga Jual Udang Segar : IDR 80.000 – 150.000/kg

PT. Bomar memperoleh udang windu yang dikelola secara tradisional dan udang vannamei yang dikelola secara tradisional, semi intensif dan intensif. Sumber bahan baku ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, bahkan Kalimantan Selatan. Tambak mitra PT. Bomar yang seluas 63,45 hektar yang berubah menjadi 59,7 hektar sejak lepasnya tambak yang dijaga oleh Rizal, seluas 3,76 hektar (tidak disewa lagi) terdiri atas 9 petak tambak, kemudian lepas lagi tambak yang dijaga Pak Amir seluas 2,74 hektar, sehingga total luasan tambak yang digunakan hingga Desember 2018 yaitu 56,96 hektar. Sejak September 2019, tambak yang dikelolah oleh Saka terjadi perubahan dari 9.91 hektar menjadi 5 hektar karena 4.91 hektar tidak dikontrakkan kembali oleh pemilik tambak kepada H. Tantag/H. Maming. Sehingga, luas tambak AIP per Agustus 2020 secara keseluruhan adalah **53,42** hektar.

Tambak mitra PT. Bomar mengandalkan pasang surut untuk pemasukan air tambak, memanfaatkan pakan alami berupa plankton, phronima (crustacea kecil) dan klekap. Input – input budidaya untuk pengelolaan secara tradisional yaitu saponin atau biopestisida untuk membunuh hama ikan dan pupuk kimia berupa urea, SP36 dalam jumlah kecil, serta beberapa tambahan pupuk cair seperti ursal dan perangsang plankton yaitu lodan. Benur diperoleh dari hatchery udang windu, yaitu dari Hatchery BBU Suppa Pinrang dan Hatchery Puncak Sinunggal, serta dari BBAP Takalar. Pada Mei-Oktober 2019, benur diperoleh hanya dari BBU Suppa.

Dalam satu siklus, biasanya udang yang ditebar dengan padat tebar 1 ekor/meter2 atau dalam satu hektar ditebar benur sebanyak 10.000 benur. Dengan padat tebar sedemikian, untuk luas lahan 1 hektar dapat memperoleh udang antara 30-100 kilogram. Benur yang ditebar adalah benur yang telah ditokolkan selama minimal 5-7 hari atau sudah Post larva (PL) 16. Pemeliharaan dimulai dengan persiapan lahan tambak dalam bentuk pengeringan tambak, pemberantasan hama, persiapan air tambak, pemeliharaan benur, panen dan pasca panen. Pemeliharaan dilakukan selama 2 – 4 bulan sampai udang berukuran (size) 60 – 15 ekor/kilogram dan dipanen saat perairan dalam kondisi pasang (siklus pasang), sebab udang dalam kondisi baik saat pasang. Penebaran benur dilakukan setiap 3-4 bulan. Metode panen menggunakan jaring set net yang dipasang berdekatan dengan pintu air. Proses pemanenan biasanya berlangsung selama satu minggu. Dalam satu tahun udang windu dipelihara hingga lima siklus pemeliharaan.

Untuk pembudidaya udang windu mitra PT. Bomar, telah menerapkan Better Management Pracitce (BMP) Budidaya Udang Windu WWF-Indonesia, serta mulai menerapkan standar budidaya udang bertanggungjawab dan berkelanjutan melalui sertifikasi ASC Shrimp dan berupaya keras agar nantinya tambak tersebut memperoleh sertifikat ASC Shrimp. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh petambak mitra PT. Bomar, yaitu menerapkan sistem pencatatan budidaya, lingkungan dan sosial, serta melakukan penanaman mangrove di saluran air sekitar tambak.

**Kondisi Tambak-Tambak di Pallameang, Mattirosompe, Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan**

****

**Foto 1.Kondisi tambak di Pallameang, dikelola oleh H. Jamal (©WWF-Indonesia/Mushadiq)**

****

**Foto 2. Kondisi saluran air tambak di Pallameang (WWF-Indonesia/Mushadiq)**

**Skema Sistem Penjualan Udang Windu PT. Bomar**

**Petambak 1**

**Petambak 2**

**Petambak 3**

**Petambak 4**

**Petambak 5 dst**

**Pengumpul**

**Pengumpul**

**Pengumpul**

**Pabrik Pengolahan di Makassar**

**Eksportir**

**Kapasitas Produksi**

**Kapasitas produksi udang windu PT. Bogatama Marinusa (Bomar)**

PT. Bomar dalam satu bulan melakukan pengiriman udang ke luar negeri sebanyak 10 kontainer dalam satu bulan atau dalam satu hari berkisar 300 - 3000 kg perhari. PT. Bomar mempekerjakan sekitar 800 pekerja. Produk terdiri atas pertama: udang dengan kepala lengkap atau *Head On Shell* (HOSO), dengan variasi yaitu *Block Quick Frozen* (Sistem Pendinginan Cepat dalam blok), *Semi individual Quick Frozen* (Sistem Pendinginan cepat semi individual) dan *Individual Quick Frozen* (Sistem Pendinginan Cepat Individual); kedua: Udang tanpa kepala atau *head Less Shell On* (HLSO) dalam *Block Quick Frozen* dan *Individual Quick Frozen.* Ketiga yaitu udang dikupas dengan ekor utuh atau *Peeled Deveined Tail On* (PDTO) dengan sistem *Semi individual Quick Frozen,* dan *Individual Quick Frozen*; Keempat: udang yang karapas dikupas utuh (*Peeled and Deveined* (PND), dengan *Block Quick Frozen, Semi Individual Quick Frozen* dan *Individual Quick Frozen.*



Foto 3. Udang pasca panen milik H. Tantang (**©WWF-Indonesia/Zulkarnain)**



Foto 4. Udang WIndu HOSO. Sumber : http://www.affish.nl/2017-black-tiger-shrimp-hoso-semi-iqf

**Ringkasan Perkembangan AIP**

Pemenuhan audit check list ASC tambak mitra AIP PT. Bogatama Marinusa (BOMAR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Prinsip 1** | **Prinsip 2** | **Prinsip 3** | **Prinsip 4** | **Prinsip 5** | **Prinsip 6** | **Prinsip 7** | **Total** |
| ***Internal Audit Results - September 2021*** | | | | | | | | |
| Number of compliance items | 7 | 28 | 16 | 80 | 36 | 27 | 72 | 266 |
| Fulfilled compliance  (Score 0 – 1) | 3.8 | 26.2 | 14.1 | 72.1 | 30.8 | 21.7 | 64.4 | 233.1 |
| Percentage of compliance (%) | 54.29 | 93.57 | 88.13 | 90.13 | 85.56 | 80.37 | 89.44 | **87.63** |
| ***Previous Crop Cycle: Nov 2018 – August 2019*** | | | | | | | | |
| Percentage of compliance (%) | 42.86 | 91.43 | 91.25 | 91.38 | 96.67 | 90.37 | 95.28 | **91.77** |

Secara umum terdapat beberapa masalah kepatuhan terhadap standar, yaitu: bukti kepemilikan tanah dan izin usaha yang belum lengkap atau tersedia, pemahaman kontrak yang masih kurang antara H. Tantang dan petani, tidak lengkapnya dokumen bagi hasil antara petani dan H. Tantang, tidak tersedianya data PL yang ditebar sehingga data SR tidak dapat dihitung. Belum ada implementasi piloting aplikasi RICA probiotik untuk mengatasi SR rendah seperti yang direkomendasikan oleh studi B-EIA, belum ada pelatihan keselamatan kerja. Namun, masalah krusial yang belum dapat diselesaikan sampai saat ini adalah minimnya komitmen H. tantang terhadap keberlanjutan AIP sehingga berdampak pada tertutupnya akses untuk implementasi program pada lokasi AIP. Hal ini menginisiasi rencana fokus kegiatan PT. Bomar untuk periode Januari – Juni 2020 yaitu : 1) untuk memperoleh kesediaan H. Tantang untuk mengkonfirmasi komitmen terhadap AIP PT BOMAR. Terutama dengan adanya pelarangan akses pihak WWF Indonesia maupun pihak BOMAR pada area tambak milik H. Tantang. 2) Pendaftaran tambak untuk memperoleh sertifikat tanah melalui program PTSL. 3) Melanjutkan program rehabilitasi mangrove seluas 3,6 hektar dari 28 hektar sesuai dengan rekomendasi laporan BEIA. 4) Peningkatan SR udang dengan Aplikasi probiotik dan *Nursery Improvement program*.

Untuk memenuhi persyaratan prinsip 1 tentang kepatuhan hukum, WWF Indonesia telah mengumpulkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional. Petani dapat mendaftarkan lahannya melalui sistem yang dibangun oleh pemerintah bernama PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Pendaftaran ini memerlukan Daftar Keluarga, Kartu Tanda Penduduk pemilik, Informasi tanah Usulan yang disetujui oleh pemerintah desa, dan penerimaan pajak tanah. Persyaratan ini telah dikomunikasikan kepada BOMAR dan diharapkan BOMAR dapat menindaklanjuti dengan membantu H. Tantang dalam mendaftarkan tambaknya. Pihak WWF Indonesia juga telah melakukan kordinasi lebih lanjut dengan DKP Pinrang untuk program SEHATKAN (Sertifikat Tanah Pembudidaya Ikan). SEHATKAN merupakan program DJPB KKP yang bekerjasama dengan Badan pertanahan Nasional untuk memberikan sertifikat tanah secara gratis kepada pembudidaya melalui mekanisme pengusulan dari DKP setempat. Formulir dan persyaratan telah dikomunikasi kepada BOMAR untuk dapat menindaklanjuti dengan membantu H. Tantang dalam mendaftarkan tambaknya. Namun, tidak ada tanggapan atau keberlanjutan dari H. tantang dan BOMAR.

Untuk rehabilitasi ekosistem, WWF Indonesia telah mendukung BOMAR untuk menanam 190.685 mangrove yang memiliki tingkat kelangsungan hidup 89,86% secara keseluruhan, mencakup area seluas 23,6 ha dari 28 ha sesuai persyaratan dari laporan BEIA. Selama periode Januari-Juni 2021, sebanyak 10.000 bibit mangrove telah ditanam pada beberapa daerah yaitu Takalar, Maros, Bulukumba, Jeneponto dan Pinrang. Sementara untuk peningkatan SR udang, pihak WWF Indonesia telah melakukan diskusi dengan BOMAR untuk peningkatan SR udang windu dengan penerapan SOP *Nursery Improvement program* di tambak H. Tantang sesuai dengan saran dari Pak coco (Konsultan BOMAR). SOP ini kemudian dikomunikasikan lebih lanjut antara BOMAR dan H. Maming (Perwakilan H. Tantang). Namun, tidak ada respon positif dari H. maming/H. tantang dan sampai saat ini tidak ada komunikasi lanjutan terhadap rencana tersebut.

AIP menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada di Standar ASC Shrimp:

**PRINSIP 1: KEPATUHAN TERHADAP SEMUA HUKUM DAN REGULASI SETEMPAT DAN NASIONAL YANG BERLAKU**

* 1. Kepatuhan yang terdokumentasi terhadap persyaratan hukum setempat dan nasional

Terdapat beberapa tambak yang sudah memiliki dokumen legalitas. Namun, beberapa dokumen seperti surat kontrak sudah habis masa berlakunya dan terdapat akta/sertipikat tanah yang bukan atas nama H. Tantang (H. Ruslan). Adapun rincian status tambak AIP dan keteresdiaan dokumennya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Status perubahan lahan tambak AIP PT. Bomar Tahun 2018-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode tambak** | **Nama**  **petambak** | **Luas Tambak (Ha) berdasarkan:** | | | **Status kepemilikan tambak** | **Status dokumen legalitas** | **Upaya yang telah di lakukan oleh WWF** | **Rencana tindak lanjut: dokumen legalitas alternatif yang berkekuatan hukum** |
| **Laporan BEIA (2018)** | **Pengukuran ulang (2020)** | **Dokumen legalitas** |
| 1 | Sultan | 11.57 | 11.38 | 11.5 | * 6 Ha dikontrak atas nama H. Najlah (istri H. Tantang) dari H. Andi Bustanuddin * 5.5 Ha milik H. Tantang | * Surat kontrak 6 Ha sudah kadaluarsa pada bulan September 2012. * 5.5 Ha tambak milik H. Tantang tidak ada dokumen legalitas. * PBB tersedia, namun atas nama orang dan luas lahan yang berbeda-beda (12.6 Ha) | * Menyediakan informasi terkait program dari pemerintah: PTSL/SEHATKAN. * Dokumen-dokumen pembuatan sertifikat lahan (PTSL/SEHATKAN): KTP, KK, Letter C, Akta Jual Beli/ Akta Hibah/ Berita Acara Kesaksian, tanda batas tambak, bukti pajak, surat permohonan (SKT) dan surat pernyataan peserta. | * Membuat surat kontrak baru atas nama H. Tantang dengan H. Andi Bustanuddin. * Menyediakan Surat XXXX * Melakukan klarifikasi kemungkinan ketidaksamaan lokasi lokasi tambak dengan yang tertera di PBB |
| 2 | Saka | 9.91 | 6.68 | 4 | * 4 Ha dikontrak dari H. Andi Bustanuddin. Namun, sejak 2019 akhir tambak sudah tidak dikontrak lagi oleh H. Tantang | * Surat kontrak 4 Ha sudah kadaluarsa pada bulan September 2018 | * Memperbaharui kontrak baru dengan H. Andi Bustanuddin atau mencari lokasi tambak lain. |
| 5 | * 5 Ha milik H. Tantang | * Surat legalitas tambak 5 Ha tersedia, namun bukan atas nama H. Tantang (tidak ada informasi atas nama siapa). * PBB tersedia, atas nama Amir Safiruddin (10.86 Ha) dan Andi Haerudin (1.3 Ha) | * Menyediakan Surat XXXX * Melakukan klarifikasi kemungkinan ketidaksamaan lokasi lokasi tambak dengan yang tertera di PBB |
| 3 | H. Maming | 11.08 | 11.27 | 12 | Milik H. Tantang | * Akte jual beli dan sertipikat tanah tersedia, namun atas nama M. Jamal Ruslan (putra H. Tantang). * PBB tersedia, atas nama M. Jamal Ruslan (12 Ha) | * Melakukan klarifikasi kemungkinan ketidaksamaan lokasi lokasi tambak dengan yang tertera di PBB |
| 4 | Mansur | 7.02 | 6.83 | 10.2 | Milik H. Tantang | * Surat legalitas tambak 10.2 Ha tersedia, namun bukan atas nama H. Tantang (tidak ada informasi atas nama siapa). * PBB tersedia, atas nama M. Jamal Ruslan (10 Ha). | * Melakukan klarifikasi kemungkinan ketidaksamaan lokasi lokasi tambak dengan yang tertera di PBB |
| 5 | Umar | 7.13 | 7.03 | 7.8 | Milik H. Tantang | * Surat legalitas tambak 7.8 Ha tidak tersedia * Hanya bukti pembayaran PBB yang tersedia, atas nama Sari Bulang B Hasanuddin (7.8 Ha) | * Menyediakan Surat XXXX * Melakukan klarifikasi kemungkinan ketidaksamaan lokasi lokasi tambak dengan yang tertera di PBB |
| 6 | Umar | 4.97 | 4.74 | 5.28 | Tidak ada dokumen | * Surat legalitas tambak 7.8 Ha tidak tersedia. * Hanya bukti pembayaran PBB yang tersedia, atas nama Bustanuddin (5.28 Ha) | * Menyediakan Surat XXXX * Melakukan klarifikasi kemungkinan ketidaksamaan lokasi lokasi tambak dengan yang tertera di PBB |
| 7 | Amir | 2.64 | 5.49 | 6 | Dikontrak dari Hj. Andi Dewi Djabbar. Saat ini tambak digabung menjadi 1 petak dari semula 2 petak. | * Kontrak tambak 6 Ha sudah kadaluarsa pada bulan September 2019. * PBB tersedia, atas nama H. Bustam Hasanuddin (6 Ha). | * Membuat surat kontrak baru atas nama H. Tantang dengan H. Andi Dewi Djabbar. * Melakukan klarifikasi kemungkinan ketidaksamaan lokasi lokasi tambak dengan yang tertera di PBB |
| 2.64 |
| **Total** | | **56.96** | **53.42** | **57.78** |  |  |  |  |

**PRINSIP 2: PENEMPATAN TAMBAK DI LOKASI-LOKASI YANG TEPAT SECARA LINGKUNGAN DAN MELESTARIKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM ALAMI YANG PENTING**

Kriteria 2.1. Analisis Mengenai Dampak Terhadap Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Biodiversity (B-EIA): Dokumen BEIA yang disusun oleh PT. Deco dan telah direvisi konten oleh Achmad Fuad Faturrahman (konsultan dari Aquaculture Celebes Community), dilakukan koreksi lanjutan oleh tim internal program akuakultur WWF-Indonesia. Meski demikian perlu dilakukan pelengkapan dokumen-dokumen lampiran, seperti notulensi dan catatan-catatan wawancara. Salah satu rekomendasi BEIA adalah penanaman mangrove seluas 28 hektar.

Kriteria 2.2. Kawasan lindung dan habitat kritis: lokasi tambak tidak terletak di kawasan lindung dan bukan merupakan habitat kritis. Hal ini dibuktikan melalui laporan BEIA. Tambak dibangun sebelum tahun 1999 atau sebelum kesepakatan Ramsar mengenai penggunaan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya perairan. Hal ini berarti diperbolehkan aktivitas budidaya di daerah tersebut. Terdapat tambahan peta tambak sebelum 1999 yang lebih akurat menunjukkan bahwa tambak dibangun sebelum 1999.

Sejak januari – Juni 2021 telah dilakukan rangkaian aktivitas perbaikan lingkungan seperti penanaman mangrove untuk merehabilitasi 28 hektar konversi lahan tambak ke lahan mangrove. Telah dilakukan penanaman diberbagai lokasi seperti di Loliko Polewali Mandar, Tekolabbua Pangkep, Puntondo & Laikang Takalar, Tanroe Pinrang, Binasangkara Maros, Luppung & Kajang Bulukumba, Tarowang Jeneponto, Lantebung Makassar, dan lain-lain. Hingga bulan Juni 2021 telah tertanam sekitar 190.685 pohon mangrove dengan tingkat kelangsungan hidup sekitar 89,86% sehingga total pohon mangrove yang hidup sekitar 171.349 pohon.

Kriteria 2.3. Pertimbangan habitat kritis untuk spesies terancam punah: dari hasil pendataan BEIA tidak ditemukan spesies yang terancam punah. Terdapat identifikasi terbaru terhadap hewan-hewan yang dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.20 MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yaitu Kuntul Kecil (*Egretta gerzetta*), Kowak Maling (*Nycticorax caledonicus*), Kuntul Besar (*Egretta alba*), Dara Laut Biasa (*Sterna hirundo*), Gagang Bayam Belang (*Himantopus leucocephalus*), Dara Laut Kecil (*Sternula albifrons*).

Kriteria 2.4. Penyangga, pembatas, dan koridor ekologis: data penyangga dan koridor ekologis terdapat dalam laporan BEIA. Penyangga berupa barrier mangrove tidak ada lantaran sudah ada infrastruktur jalan di pinggir pantai. Penyangga hanya ada di muara saluran air. Koridor tidak begitu dibutuhkan karena tidak ada organisme darat yang membutuhkan koridor. Meski begitu, dengan kegiatan penanaman mangrove di saluran air dapat menghasilkan sistem koridor bagi hewan-hewan yang hidup di sekitar tambak.

Kriteria 2.5. Pencegahan salinisasi sumber daya air tawar dan tanah: data salinasi terdapat dalam dokumen BEIA dan terus diperbaharui data salinasi setiap bulan. Tidak ada penggunaan sumur dalam operasional tambak, sehingga dampak salinasi sangat kecil atau tidak berpengaruh. Terdapat sebuah sumur di dekat Kawasan tambak. Telah dilakukan pengukuran terhadap sumur tersebut untuk mengidentifikasi tingkat salinasi terhadap air tawar.

**PRINSIP 3: PENGEMBANGAN DAN OPERASI TAMBAK DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MASYARAKAT SETEMPAT**

Kriteria 3.1. Semua dampak terhadap masyarakat sekitar, pengguna ekosistem dan pemilik lahan telah dipertimbangkan dan telah/akan dinegosiasikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan: telah berlangsung aktivitas penilaian pSIA oleh pihak ketiga dalam hal ini CV. Deco. Dokumen pSIA ini pun telah dilakukan revisi mengenai dampak sosial, ekonomi dan budaya kegiatan tambak terhadap masyarakat sekitar. Telaah pSIA antara lain: mitra PT. Bomar membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar tambak. Peningkatan ekonomi bagi para pekerja dan keluarga pekerja, tidak terdapat konflik sosial maupun potensi konflik antara petambak dengan masyarakat sekitar, dampak lainnya yaitu peningkatan pemahaman petambak mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan linkungan melalui kegiatan penanaman mangrove. Penyediaan infrastruktur seperti kamar kecil/water closed berpengaruh pada perubahan gaya hidup bersih petambak yang tinggal di sekitar tambak.

Kriteria 3.2. Keluhan oleh pemangku kepentingan yang mengalami dampak tengah diselesaikan: belum ada konflik dengan masyarakat setempat. Tersedia SOP dan dokumen untuk penangaan konflik dengan masyarakat setempat. Sementara dibuat kotak saran untuk disimpan di pemukiman masyarakat yang paling dekat dengan tambak. Kotak saran tersebut menjadi ruang bagi publik untuk memberi saran dan kritik terhadap pelaksanaan budidaya udang H. Tantang.

Kriteria 3.3. Transparansi dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat: semua pekerja tambak berasal dari sekitar tambak. Sehingga, secara transparansi, H. Tantang memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat setempat.

Kriteria 3.4. Pengelolaan tambak secara kontrak (bila dipraktekkan) bersifat adil dan transparan bagi pengelola tambak yang dikontrak: tambak merupakan milik pribadi, hanya satu petak tambak yang merupakan tambak kontrak. Pengelolaan tambak kontrak dikelola secara adil. Hubungan antara PT. Bomar dengan H. Tantang belum dalam bentuk kontrak tertulis.

**ASAS 4: PENGOPERASIAN TAMBAK DENGAN PRAKTEK TENAGA KERJA YANG BERTANGGUNG JAWAB**

Kriteria 4.1. Tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan pekerja usia muda: para petambak merupakan pekerja dengan usia di atas 18 tahun. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Kriteria 4.2. Tenaga kerja paksa, terikat, dan wajib: para petambak bertanggungjawab terhadap pengelolaan tambak, tidak ada pemaksaan dalam kerja. Selain itu, pekerja masih dapat mencari aktivitas lain selain menjaga tambak untuk menambah penghasilan. Aktivitas pendampingan tambak hanya berupa pengontrolan air secara tradisional, sehingga cukup banyak waktu luang untuk mencari sumber-sumber penghasilan yang lain.

Kriteria 4.3. Diskriminasi di lingkungan kerja: tidak ada diskriminasi di lingkungan kerja. Semua pekerja laki-laki dan merupakan penduduk sekitar.

Kriteria 4.4. Kesehatan dan keamanan lingkungan kerja: pada umumnya para pekerja dalam kondisi sehat. Namun, belum ada kegiatan pelatihan kesehatan terhadap pekerja serta belum tersedia fasilitas pengobatan kepada para pekerja serta jaminan kesehatan melalui kartu BPJS.

Kriteria 4.5. Upah minimum dan adil [73] atau “upah yang layak”: para pekerja memperoleh upah dalam bentuk komisi/persenan dari hasil panen, yaitu sekitar 10 persen dari hasil panen. Jika dirata-ratakan, upah kurang dari UMR. Tapi, jika dilihat dari frekuensi kerja, para pekerja bukan merupakan pekerja penuh tapi berupa pekerja tradisional.

Kriteria 4.6. Akses kepada kebebasan berasosiasi dan hak tawar secara kolektif: para pekerja diberi kebebasan untuk ikut berasosiasi. Sejak pendampingan, para petambak telah mengikuti pertemuan-pertemuan untuk membahas permasalahan budidaya dan peningkatan kapasitas para pembudidaya.

Kriteria 4.7. Gangguan dan praktek disipliner di lingkungan kerja menyebabkan kerusakan fisik dan/atau mental secara sementara atau permanen: sejauh ini belum ada tindak disipliner, apalagi yang dapat menyebabkan kerusakan fisik ataupun mental.

Kriteria 4.8. Kompensasi lembur dan jam kerja: para petambak bekerja menyesuaikan dengan tahapan – tahapan dalam kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya yang utama adalah pada persiapan tambak, penebaran benur, menjaga kualitas air, dan panen. Waktu luang pekerja tambak cukup banyak karena tambak yang diawasi hanya rata-rata satu tambak dan dalam pemeliharaan lebih banyak waktu dihabiskan untuk sekadar pemeliharaan, yang tidak menuntut kehadiran fisik di lokasi tambak. Adanya inisiasi untuk penyusunan timesheet petambak.

Kriteria 4.9. Kontrak pekerja bersifat adil dan transparan: Tersedia dokumen perjanjian kerjasama antara pemilik tambak dengan mitra kerjatambak. Namun belum ditandatangani.

Kriteria 4.10. Sistem pengelolaan pekerja yang adil dan transparan: telah tersedia form keluhan pekerja tambak. Telah tersedia diskusi rutin setiap sekali dalam sebulan atau dua bulan dengan pekerja tambak untuk membahas persoalan-persoalan tambak.

Kriteria 4.11. Kondisi tempat tinggal untuk pekerja yang diakomodasi di kawasan tambak: para pekerja tambak tinggal di rumah pribadinya tidak jauh dari lokasi tambak. Terdapat pula rumah jaga tambak, sebagai sarana pekerja tambak untuk beristirahat.

**ASAS 5: MENGELOLA KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN UDANG SECARA BERTANGGUNGJAWAB**

Kriteria 5.1. Pencegahan penyakit:

* Tersedia SOP Pencegahan penyakit udang windu. SOP ini telah disosialisasikan kepada para petambak.
* SR budidaya udang windu di Pinrang diperkirakan di bawah 25%. Terdapat artikel ilmiah popular yang menunjukkan bahwa secara umum SR budidaya udang di daerah Pinrang di bawah 25%, diterbitkan oleh media Info Akuakultur. Artikel penjelasan mengenai SR di bawah 25% ini ditulis oleh peneliti udang windu dari Balai Budidaya Air Payau Maros, yaitu Dr. Taruna Mulya.
* Terdapat pengujian benur yang dibeli dari Hatchery PT. Benur Bagindo Utama (BBU) SPF (*Spesific Patogen Free*). Hasil pengujian yaitu negative WSSV (White Spot Syndrom Virus).

Kriteria 5.2. Pengendalian pemangsa: Tidak ditemukan upaya secara sengaja untuk mematikan dari spesies yang dilindungi, terancam, atau hampir punah sebagaimana didefinisikan oleh Daftar Merah (Red List). Predator yang ditemukan hanya berupa biawak yang memasuki/bersembunyi di dalam lubang kepiting diatas pematang atau di saluran air.

Kriteria 5.3. Pengelolaan dan pengobatan penyakit:

* Pemilik tambak komitmen untuk tidak menggunakan antibiotik. Terdapat dokumen secara tertulis.
* Tersedia catatan penggunaan bahan – bahan kimia berupa pupuk, dan pemberantas hama tambak. Sebagian petambak masih menggunakan besnoid untuk pemberantasan hama kekerangan.
* Petambak tidak menggunakan probiotik.

**ASAS 6: MENGELOLA ASAL USUL INDUKAN, SELEKSI STOK DAN EFEK PENGELOLAAN STOK**

Kriteria 6.1. Keberadaan spesies udang asing atau yang diperkenalkan dari luar daerah: Udang yang digunakan adalah udang lokal Indonesia, yaitu udang windu. Tersedia data pembelian benih udang dalam beberapa bulan. Bukti spesies asli dapat dilihat dari Buku Ali Purnomo. Untuk sumber bacaan lainnya ada di Primavera, SEAFDEC, FAO.

Alat penjebak udang udang berupa lapisan waring pada pintu air.

Kriteria 6.2. Asal-usul benur atau indukan:

* Tersedia dokumen dari hatchery sumber udang yang menyatakan bahwa benur tersebut bebas dari penyakit.
* Tersedia informasi secara lengkap mengenai asal usul induk yang diperoleh dari hatchery udang windu.
* Catatan tambahan: Telah tersedia dokumen asal usul benur udang windu di Pinrang.

Kriteria 6.3. Udang transgenic: udang windu yang dipelihara bukan udang transgenic.

**ASAS 7: PENGGUNAAN SUMBERDAYA DENGAN CARA YANG EFISIEN DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA LINGKUNGAN**

Kriteria 7.1. Keterlacakan material mentah dalam pakan: tidak menggunakan pakan buatan.

Kriteria 7.2. Asal-usul bahan pakan akuatik dan darat: tidak menggunakan pakan buatan.

Kriteria 7.3. Penggunaan bahan modifikasi genetik (GM) dalam pakan: tidak menggunakan pakan buatan.

Kriteria 7.4. Penggunaan ikan liar [136] secara efisien untuk tepung ikan dan minyak ikan: tidak menggunakan pakan buatan.

Kriteria 7.5. Kandungan kontaminan dalam limbah: Terdapat dokumen hasil pemeriksaan kualitas air masuk, air keluar dan air dalam tambak, untuk pengukuran N total dan P Total.

Kriteria 7.6. Efisiensi energy: Konsumsi energi [142] menurut sumber energi [143] selama periode 12 bulan: penggunaan energi berupa bensin untuk operasional petambak menggunakan motor, untuk mengelilingi tambak.

Kriteria 7.7. Penanganan dan pembuangan bahan dan limbah berbahaya: Telah terdapat SOP penanangan limbah. Perlu dibuat SOP penananganan sampah yang berada di lokasi tambak.

**Rangkaian AIP Udang Vannamei Petambak Mitra PT. Bogatama Marinusa (Bomar) bulan Januari – Desember 2021:**

Pemenuhan audit check list ASC tambak mitra AIP PT. BOMAR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Principle 1** | **Principle 2** | **Principle 3** | **Principle 4** | **Principle 5** | **Principle 6** | **Principle 7** | **Total** |
| ***Internal Audit Results - September 2021*** | | | | | | | | |
| Number of compliance items | 7 | 28 | 16 | 80 | 36 | 27 | 72 | 266 |
| Fulfilled compliance  (Score 0 – 1) | 3.8 | 26.2 | 14.1 | 72.1 | 30.8 | 21.7 | 64.4 | 233.1 |
| Percentage of compliance (%) | 54.29 | 93.57 | 88.13 | 90.13 | 85.56 | 80.37 | 89.44 | **87.63** |
| ***Previous Crop Cycle: Nov 2019 – August 2020*** | | | | | | | | |
| Percentage of compliance (%) | 42.86 | 91.43 | 91.25 | 91.38 | 96.67 | 90.37 | 95.28 | **91.77** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gap** | **Indikator kesuksesan** | **Action dari BOMAR** | **Action dari WWF** | **Status** |
| ***Prinsip 1*** | | | |  |
| Belum tersedianya dokumen legalitas legalitas tambak | Tersedianya sertifikat lahan/ surat kontrak/ akte jual beli tanah | Menyediakan seluruh persyaratan dokumen-dokumen pembuatan sertifikat lahan (PTSL/SEHATKAN): KTP, KK, Letter C, Akta Jual Beli/ Akta Hibah/ Berita Acara Kesaksian, tanda batas tambak, bukti pajak, surat permohonan (SKT) dan surat pernyataan peserta | Menyediakan seluruh informasi cara mengurus sertifikat lahan (PTSL/SEHATKAN) | No progress |
| Belum tersedianya SIUP | Tersedianya SIUP budidaya udang windu | Menyediakan seluruh persyaratan dokumen-dokumen pembuatan SIUP: KTP, BPJS, surat rekomendasi dari DKP dan KLHK, tanda tangan 12 petambak di sekitar lokasi tambak AIP | Menyediakan foto peta tambak AIP, tanda tangan 12 petambak di sekitar lokasi tambak AIP | No progress |
| ***Prinsip 2*** | | | |  |
| Belum terpenuhinya rehabilitasi mangrove sesuai rekomendasi BEIA seluas 6.5 ha dari total 28 ha (sudah 20.5 ha). | Tertanamnya mangrove seluas 6.5 ha untuk mencapai total penanaman seluas 28 ha | * Memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi mangrove sesuai rekomendasi BEIA seluas 6.5 ha. | * Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti: komunitas pecinta alam, instansi pemerintah (DKP, KLHK, desa/kecamatan). * Melakukan kegiatan penanaman di Pinrang (1 ha) dan Lantebung (3 ha). * Melakukan monitoring kelangsungan hidup dan pertumbuhan mangrove. | On progress |
| ***Prinsip 3*** | | | |  |
| Belum dipahaminya isi kontrak oleh pemilik tambak (H. Tantang) dengan petambak mitra | * Dipahaminya isi/ konten kontrak yang telah ditandatangi oleh kedua belah pihak. * Disepakatinya kontrak antara kedua belah pihak. | * Memastikan H. Tantang mengerti dan memahami isi kontraknya dengan petambak mitra. * Memfasilitasi pertemuan antara H. Tantang dengan para petambak mitra dalam rangka memberikan penjelasan isi kontrak. | * Membantu dalam memberikan penjelasan/ sosialisasi kontrak kepada petambak mitra. * Membantu dalam melakukan pertemuan antara H. Tantang dan para petambak mitra. | No progress |
| ***Prinsip 4*** | | | |  |
| Sudah tersedianya nota bagi hasil bagi petambak mitra untuk siklus terakhir (Nov 2019 – Agustus 2020).  TERSEDIA:  >UMAR  >SULTAN  >AB ANSA (AMIR)  PETAMBAK LAIN BELUM | Tersedianya nota bagi hasil bagi hasil dari seluruh pekerja tambak untuk siklus terakhir (Nov 2019 – Agustus 2020) | Mengkonfirmasi kesediaan H. Tantang untuk memberikan nota kesepakatan bagi hasil | Mengumpulkan seluruh nota bagi hasil dari seluruh petambak mitra | On progress |
| Belum terlaksananya pelatihan keselamatan kerja bagi para petambak mitra | Terlaksananya pelatihan keselamatan kerja bagi seluruh petambak mitra | * Meminta persetujuan H. Tantang untuk penyelanggaraan pelatihan keselamatan kerja. * Memfasilitasi pelaksanaan training keselamatan kerja bagi para petambak mitra. | Memfasilitasi narasumber pelatihan keselamatan kerja | No progress |
| ***Prinsip 5*** | | | |  |
| Sudah tersedianya data hasil pemanenan selama siklus terakhir (Nov 2019 – Agustus 2020) untuk penghitungan SR.  YANG BELUM TERSEDIA:  PAK SAKA | Tersedianya data hasil pemanenan selama siklus terakhir (Nov 2019 – Agustus 2020) untuk penghitungan SR. | * Meminta persetujuan H. Tantang dan H. Maming terkait data hasil panen selama siklus terakhir. * Meminta data hasil panen selama siklus terakhir. | Mengumpulkan seluruh data panen selama siklus terakhir untuk melakukan perhitungan SR. | Done |
| Belum tersedianya dokumen SPF/SPR sesuai daftar OIE terhadap PL siklus terakhir | Tersedianya dokumen SPF/SPR dari seluruh penebaran PL selama siklus terakhir | Menghubungi dan meminta pihak hatchery untuk melakukan uji SPF/SPR | Mengumpulkan dokumen SPF untuk seluruh penebaran PL selama siklus terakhir | No progress |
| Belum adanya tempat dan labelling untuk penyimpanan bahan-bahan kimia di sekitar lokasi tambak AIP | Tersedianya tempat penyimpanan bahan kimia yang sesuai dengan prosedur | * Meminta persetujuan H. Tantang dan H. Maming untuk membuat/menyediakan tempat penyimpanan bahan kimia * Memfasilitasi penyediaan alat dan bahan pendirian tempat penyimpanan bahan kimia | * Merekomendasikan tempat penyimpanan bahan kimia sesuai SOP * Memfasilitasi penyediaan alat dan bahan pendirian tempat penyimpanan bahan kimia * Membuat/mendirikan tempat penyimpanan bahan kimia yang sesuai SOP | No progress |
| Belum terlaksananya training dan pilot projek aplikasi probiotik RICA pada tambak AIP | Terlaksananya training dan pilot projek aplikasi probiotik RICA | Meminta persetujuan H. Tantang dan H. Maming untuk pelaksanaan training dan pilot projek aplikasi probiotik RICA di tambak AIP | * Memfasilitasi penyediaan alat dan bahan pelaksanaan training dan pilot projek aplikasi probiotik RICA | No progress |
| ***Prinsip 6*** | | | |  |
| Belum tersedianya nota pembelian dan tersedianya data penebaran benur selama siklus terakhir (Nov 2019 – Agustus 2020) | Tersedianya nota pembelian dan data penebaran benur selama siklus terakhir (Nov 2019 – Agustus 2020) | * Meminta persetujuan H. Tantang dan H. Maming terkait nota pembelian dan data penebaran benur selama siklus terakhir. * Meminta nota pembelian dan data penebaran benur selama siklus terakhir. | Mengumpulkan seluruh nota pembelian dan data penebaran benur selama siklus terakhir. | On progress |
| ***Prinsip 7*** | | | |  |
| Belum terlaksananya training penyimpanan input bahan kimia sesuai dengan prosedur | Terlaksananya training penyimpanan input bahan kimia sesuai dengan prosedur | * Meminta persetujuan H. Tantang untuk penyelanggaraan training penyimpanan input bahan kimia sesuai dengan prosedur. * Memfasilitasi pelaksanaan training penyimpanan input bahan kimia sesuai dengan prosedur. | Memfasilitasi narasumber training penyimpanan input bahan kimia sesuai dengan prosedur. | No progress |

**Penutup**

PT. Bomar telah menjalankan AIP pada Juli – Desember 2020 dengan hasil compliance sementara 87,63%. PT. Bomar mulai melakukan perbaikan dengan perbaikan pendataan tambak, perbaikan dan penambahan data BEIA dan pSIA, perluasan area penanaman mangrove, serta sosialisasi SOP-SOP Budidaya Udang, penyediaan perlengkapan dan infrastruktur, pendataan kualitas air, dan pencatatan aktivitas budidaya.

## **Rincian Perkembangan AIP**

Rincian hasil implementasi AIP oleh PT. Bomar dilihat pada tabel berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRINSIP DAN INDIKATOR** | | **ACTION LEAD & PARTNERS** | **Tahapan Seafood Savers** | | **AIP** | **Hasil Evaluasi** | **Rencana Tindak Lanjut / Kendala** |
| Intermediate | Advance |
| **Prinsip 1. Mematuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku lokal dan nasional** | | | | | |  |  |
| 1.1.1 | Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan lokal dan nasional yang berlaku |  |  |  | 1. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan lokal dan nasional yang berlaku | Dapat dilihat pada Tabel 3 di atas | Terdapat Salinan sertifikat, namun belum lengkap. Kendala komunikasi antara PT. Bomar dengan H. Tantang. |
| 2. Fasilitasi pembuatan prosedur operasional tambak | Telah tersedia SOP – SOP tambahan SOP terkait implementasi AIP Udang.  SIUP dan TPUPI belum tersedia. | Sosialisasi SOP – SOP kepada petambak mitra PT. Bomar  Fasilitasi pembuatan SIUP dan TPUPI pada pemerintah daerah setempat. |
| 1.1.2 | Transparansi mengenai kepatuhan hukum |  |  |  | 1. Pembuatan papan informasi untuk transparansi kepatuhan hukum kepada public. | Tersedia papan informasi untuk penempelan sertifikat dan dokumen-dokumen yang menunjukkan kepatuhan petambak terhadap hukum yang berlaku. | Melakukan penempelan ulang SOP-SOP ASC Shrimp dan dokumen legalitas tambak. |
| 2. Menyediakan dokumen pencatatan aktivitas tambak dan hal-hal terkait dengan pencatatan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat petambak. | - dokumen pencatatan sebanyak 10 buku.  - Telah dilakukan pencatatan tambak ke dalam buku – buku tersebut.  - Kartu Tanda Pengenal anggota - profil petambak. |
| 3. Form permintaan informasi oleh masyarakat | ·       Form permintaan informasi oleh masyarakat tersedia |
| **PRINSIP 2. PENEMPATAN TAMBAK PADA LOKASI YANG SESUAI SECARA LINGKUNGAN SEMBARI MELINDUNGI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM ALAMI PENTING** | | | | | | | |
|
| **Kriteria 2.1: Biodiversity Environmental Impact Assessment (B-EIA)** | |  | 🗸 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Pemilik tambak harus melakukan Penilaian Dampak Lingkungan Keberagaman Hayati (BEIA) dan mensosialisasikan hasilnya secara terbuka dalam bahasa yang dapat dipahami (Proses dan dokumen BEIA harus mengikuti panduan pada Lampiran I) |  |  |  | Melakukan penyusunan laporan B-EIA | Tersedia dokumen BEIA versi revisi. | Done |
|
|
|
|
| **Kriteria 2.2: Conservation of protected areas or critical habitats** | |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Penempatan tambak di Area Dilindungi/Protected Area |  |  |  | Menyediakan peta tambak beserta koordinat GPSnya | Peta lokasi tambak telah tersedia Peta lokasi tambak yang disusun oleh WWF-ID) | Done |
| 2.2.2 | Penempatan tambak pada ekosistem mangrove maupun ekosistem lahan basah alami penting lainnya atau area yang memiliki nilai ekologis penting sesuai dengan yang ditentukan BEIA atau peraturan yang berlaku. |  |  |  | - Data satelit mangrove sebelum 1999 pada kawan JUN dan SUN sebagai penguat atas bukti pembukaan lahan yang dilakukan sebelum tahun 1900 di JUN dan 1964 di SUN. | - Laporan BEIA yang menyatakan bahwa tambak dibangun sebelum 1999, berdasarkan hasil wawancara dan FGD.  - Bukti peta satelit wilayah tambak sebelum tahun 1999 sudah tersedia | Done |
|
|
|
| **Kriteria 2.3: Pertimbangan habitat kritis untuk spesies terancam punah** | |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Penempatan tambak pada habitat kritis bagi spesies langka atau masuk dalam Red List IUCN, peraturan nasional maupun peraturan lainnya. |  |  |  | Melakukan pemenuhan data dari hasil B-EIA yang telah dilakukan oleh CV. DECO | Tersedia data hewan – hewan yang dilindungi. | Done |
|
|
|
|
|
| 2.3.2 | Menjaga habitat kritis bagi spesies langka di dalam area tambak dan menerapkan upaya perlindungan di sekitar areal pertambakan tersebut. |  |  |  | - Melakukan pemenuhan data dari hasil B-EIA yang telah dilakukan oleh CV. Deco. | - Tersedia data hewan-hewan yang dilindungi.  - Tersedia poster hewan-hewan yang ada di sekitar tambak. | Done |
|
|
|
|
| **Kriteria 2.4: Ecological buffers, barriers and corridors** | |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Coastal barriers: Minimal penghalang pantai permanen antara areal tambak dengan laut (dapat berupa konstruksi maupun penghalang alami) |  |  |  | - Data satelit mangrove sebelum 1999 pada kawasan tambak.  - Peta mangrove saat ini. | - Terdapat sejarah tambak dari laporan BEIA kawasan tambak.  - Keterangan dari masyarakat setempat mengenai sejarah tambak, bahwa tambak telah dibuka sebelum 1999.  - Penanaman mangrove di muara sungai dan saluran air tambak. | Done |
|
|
|
| 2.4.2 | Riparian buffers: Lebar minimum vegetasi alami tak terjamah antara tambak dan lingkungan perairan. |  |  |  | - Peta mangrove saat ini.  - riparian buffer telah terganti menjadi infrastruktur jalan (oleh pemerintah setempat). | - Terdapat sejarah tambak dari laporan BEIA kawasan tambak.  - buffers lebih pada di muara sungai/saluran, sebab buffer pantai telah digantikan oleh infrastruktur jalan. | - Monitoring pertumbuhan mangrove di saluran air. |
| 2.4.3 | Koridor: Lebar minimum vegetasi alami tak terjamah di areal tambak yang berfungsi menyediakan tempat gerak bagi manusia atau perlintasan spesies asli (satwa liar) menuju areal pertanian |  |  |  | - tidak ada hewan darat yang membutuhkan koridor.  - Penanaman mangrove di saluran air untuk memfasilitasi organisme laut yang membutuhkan. | Telah dilakukan penanaman mangrove di saluran air, sebagai alternative koridor bagi organisme air. | Monitoring mangrove yang ditanam di saluran air, sebagai alternative koridor bagi organisme air. |
|
| **Kriteria 2.5: Prevention of salinization of freshwater and soil resources** | |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Kehilangan air yang diizinkan melalui perembesan air dari dalam kolam |  |  |  | - Melakukan pemenuhan data dari hasil B-EIA yang telah dilakukan oleh CV. Deco terkait perembesan air dan salinasi. | - Tersedia data hasil konduktansi air sumur (air tawar) | - Monitoring hasil konduktansi air sumur |
| 2.5.2 | Kemungkinan menggunakan air tanah tawar untuk menurunkan salinitas tambak |  |  |  | - Melakukan pemenuhan data dari hasil B-EIA yang telah dilakukan oleh CV. Deco. | - terdapat kajian B-EIA mengenai data kondisi sumur warga  - para petambak tidak menggunakan air tanah (sumur bor). | - Memfasilitasi kelompok untuk melaksanakan hasil B-EIA |
| 2.5.3 | Nilai Daya Hantar Listrik (DHL) atau konsentrasi klorida air sumur yang digunakan untuk menurunkan salinitas air tambak; atau sumur yang berada di areal pertambakan dan permukaan badan air tawar yang berdekatan dengan areal pertambakan atau penerima air buangan dari tambak |  |  |  | - Melakukan pemenuhan data dari hasil B-EIA yang telah dilakukan oleh CV. Deco | - telah ada hasil kajian B-EIA  - melakukan pendataan berkala kondisi DHL atau konsentrasi klorida air sumur warga.  - para petambak tidak menggunakan air tanah (sumur bor). | - Monitoring hasil pengukuran konduktansi air sumur. |
| Requirement: DHL perairan < 1,500 µmhos/cm atau konsentrasi klorida perairan < 300 mg/L. |
| 2.5.4 | DHL atau konsentrasi klorida tanah pada ekosistem sekitar dan lahan pertanian |  |  |  | - Melakukan pemenuhan data dari hasil B-EIA yang telah dilakukan oleh CV. Deco berkaitan dengan DHL atau konsentrasi klorida tanah | - terdapat data konsentrasi klorida tanah pada ekosistem sekitar dan lahan pertanian (dibawah 1500). | - Monitoring hasil pengukuran konsentrasi klorida tanah. |
|
|
| 2.5.5 | DHL atau konsentrasi klorida dari sedimen yang siap dibuang ke luar tambak. |  |  |  | - Melakukan pemenuhan data dari hasil B-EIA yang telah dilakukan oleh CV. Deco berkaitan dengan DHL atau konsentrasi klorida dari sedimen yang siap dibuang ke luar tambak. | - Belum adanya aktivitas pembuangan sedimen ke luar tambak oleh para petambak mitra PT. Bomar. | Done |
| Nilai DHL atau Klorida lumpur yang akan dibuang tidak melebihi nilai pada tanah di area pembuangan lumpur |
| **PRINSIP 3: BANGUN DAN OPERASIKAN TAMBAK DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MASYARAKAT SEKITAR** | | | | | | | |
| **Kriteria 3.1: Seluruh dampak terhadap masyarakat sekitar, pengguna ekosistem dan pemilik lahan diperhitungkan untuk dan sebagai, atau akan, dinegosiasikan dalam sikap yang terbuka dan akuntabel** | |  | 🗸 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Pemilik tambak harus melakukan Sosial Impact Assessment (p-SIA) secara partisipatif dan menyebarluaskan hasilnya secara terbuka dalam bahasa lokal (yang dimengerti masyarakat). Pemerintah daerah dan setidaknya satu organisasi masyarakat sipil yang dipilih oleh masyarakat harus memiliki salinan dokumen ini. Dokumen dan proses P-SIA, dampak dan resiko analisis dilakukan secara partisipatif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan sekitarnya. Unsur partisipatif yang tampak/muncul disertakan dalam laporan. Hasil yang disepakati antara petambak dan masyarakat sekitar tentang bagaimana mengelola risiko dan dampak termasuk dalam laporan. |  |  |  | Melakukan penyusunan laporan P-SIA | Tersedia laporan P-SIA yang dilakukan oleh CV. Deco dan telah dikoreksi oleh tim internal WWF-Indonesia. | Done |
|
|
|
|
| **Kriteria 3.2: Penyelesaian Keluhan oleh pemangku kepentingan yang terkena dampak** | |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Pemilik tambak harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan resolusi konflik diverifikasi bagi masyarakat setempat. Kebijakan tersebut harus menyatakan bagaimana konflik yang teridentifikasi dalam p-SIA dan keluhan baru akan dilacak secara transparan, mediasi ketiga pihak dapat menjadi bagian dari proses dan menjelaskan bagaimana menanggapi semua keluhan yang diterima. Kotak pengaduan, register keluhan dan penerimaan pengaduan menggunakan bahasa lokal. |  |  |  | - Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh CV. Deco. | - Tersedia SOP untuk resolusi konflik. | Done |
|
| 3.2.2. | Area konflik atau sengketa dicatat dan dibagikan ke petambak, pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat sekitar. Setidaknya 50% dari konflik harus diselesaikan dalam satu tahun dari tanggal yang diajukan, dan total 75% pada periode antara dua audit berturut-turut. |  |  |  | - Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh CV. Deco berkaitan dengan Resolusi konflik | - terdapat hasil kajian P-SIA.  - belum terdapat konflik. | Done |
|
|
|
| - Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh CV. Deco berkaitan dengan Resolusi konflik | - Terdapat hasil kajian P-SIA  - belum terdapat konflik. | Done |
|
| **Kriteria 3.3. Transparansi dalam menyediakan kesempatan kerja didalam masyarakat local** | |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Pemilik tambak harus mendokumentasikan bukti iklan yang ditujukan untuk pekerja yang bisa mengakkses tambak dalam 1 hari perjalanan dan pekerja yang tidak dapat melakukan perjalanan ke dan dari rumah setiap hari. |  |  |  | - Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh CV. Deco berkaitan dengan Pekerja | - terdapat hasil kajian P-SIA  - rata – rata petambak merupakan orang lokal.  Form untuk rekruitmen anggota tersedia.  - H. Tantang, mitra PT. Bomar memiliki 7 pekerja tambak, yang semuanya merupakan warga lokal. | Done |
|
| 3.3.2 | Rekruitmen dilakukan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, dan berdasarkan profil dan kemampuan pekerja (keterampilan, pengalaman sesuai CV) |  |  |  | - Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh CV. Deco yang berkaitan dengan Pekerja | - terdapat dalam kajian pSIA.  - terdapat profil pekerja.  - Form untuk rekruitmen anggota tersedia.  - H. Tantang, mitra PT. Bomar memiliki 10 pekerja tambak, yang semuanya merupakan warga lokal. | Done |
|
|
| 3.4.1 | Tersedia Kontrak Kerja |  |  |  | - Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh CV. Deco berkaitan dengan Pekerja | - Terdapat hasil kajian P-SIA  - Tersedia dokumen perjanjian kerjasama antara PT. Bomar dengan mitra kerja di Pallameang. | Memastikan para mitra kerja memperoleh Salinan perjanjian kerjasama. |
|
| 3.4.2 | Ketentuan **Persyaratan** Kontrak |  |  |  | - Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh CV. Deco berkaitan dengan Pekerja | - menyediakan platform untuk perjanjian kerjasmaa antara PT. Bomar dengan mitra kerja di Pallameang. | Memastikan para mitra kerja memperoleh Salinan perjanjian kerjasama. |
|
| 3.4.3 | Transparansi dan keterbukaan dalam melakukan negoisasi |  |  |  | - Melakukan pemenuhan data dari hasil P-SIA yang telah dilakukan oleh CV. Deco berkaitan dengan Pekerja | - adanya platform untuk keterbukaan dalam melakukan negosiasi. | Memastikan skema negosiasi antara mitra kerja tambak dengan pemilik tambak, berjalan. |
|
| **PRINSIP 4. OPERASIKAN TAMBAK DENGAN PRAKTIK BURUH YANG BERTANGGUNG JAWAB** | | | | | | | |
| **Kriteria 4.1. Buruh anak dan pekerja muda** | | Kelompok | 🗸 |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Persentase pekerja terlatih di bidang keselematan dan kesehatan kerja, serta prosedur dan kebijakan yang relevan dengan pekerjaan. Peralatan keselamatan tersedia dan dipelihara dan bisa digunakan. |  |  |  | Membuat pelatihan keselamatan kerja sesuai dengan kondisi tambak | Pelatihan keselamatan kerja belum dilakukan.  Terdapat form kecelakaan kerja dan penanganan medis. | Menfasilitasi pelatihan keselamatan kerja sesuai dengan kondisi tambak |
|
| **Kriteria 4.2. Buruh paksa, terikat dan diwajibkan** | |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Hak untuk pembayaran penuh penuh dan manfaat akhir |  |  |  | Membuatkontrak kerja untuk tambak yang mempunyai pekerja | Fasilitasi membuat kontrak kerja untuk tambak yang mempunyai pekerja.  Terdapat perjanjian kerjasama sesuai dengan kebiasaan setempat. | Hubungan kerja masih bersifat informal lantaran adanya kedekatan hubungan. |
|
|
| 4.2.2. | Karyawan memiliki hak untuk menjaga dokumen identitas dan izin kerja. |  |  |  | Dokumen-dokumen pekerja tambak berada di tangan petambak semua dan tidak ada yang disimpan oleh pemilik tambak. | Memastika tidak adanya pengambilan dokumen secara sepihak oleh pemilik tambak. | Done |
|
| 4.2.3. | Pekerja tambak memiliki kebebasan bergerak di luar jam kerja. |  |  |  | Surat pernyataan jam kerja petambak | Menfasilitasi pembuatan Surat pernyataan jam kerja petambak | Done |
|
| **Kriteria 4.3: Diskriminasi di lingkungan kerja** | |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Kebijakan Anti-diskriminasi di tempat kerja, tidak terbatas pada, bagaimana menghadapi diskriminasi di tempat kerja tetapi juga pekerja memperoleh akses yang sama terhadap semua pekerjaan yang berhubungan dengan jenis kelamin, usia, asal pekerja (lokal vs pendatang), ras atau agama. Perusahaan memiliki prosedur yang jelas dan transparan untuk menanggapi keluhan diskriminasi pekerja. |  |  |  | Pembuatan surat anti diskriminasi dan pekerja di bawah umur tidak boleh dilakukan. | Surta pernyataan anti diskriminasi dan pekerja di bawah umur tidak boleh dilakukan. | Done |
|
|
| 4.3.2 | Jumlah kejadian diskriminasi |  |  |  | N/A | Pekerja berasal dari tempat yang sama, yaitu lingkungan kelurahan sekitar tambak.  Sejauh ini tidak ada diskriminasi sesama pekerja tambak. | Done |
| 4.3.3 | Kesetaraan dalam kesempatan kerja dan gaji. Semua pekerja yang dipekerjakan di tambak (dengan peran dan tingkatan yang sama) menerima gaji yang sama, tidak ada perbedaan gender, asal, ras atau agama, kesempatan promosi, pengaturan keamanan kerja dan kesempatan pelatihan untuk pekerjaan yang sama. |  |  |  | Setiap pekerja tambak mengelola satu tambak dengan pembagian hasil 10% dari hasil tambak. |  | done |
| 4.3.4 | Menghormati hak bersalin |  |  |  | N/A |  | Done |
| **Kriteria 4.4: Lingkungan kerja yang sehat dan aman** | |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Persentase pekerja terlatih di bidang keselematan dan kesehatan kerja, serta prosedur dan kebijakan yang relevan dengan pekerjaan. Peralatan keselamatan tersedia dan dipelihara dan bisa digunakan |  |  |  | Membuat pelatihan keselamatan kerja sesuai dengan kondisi tambak | Pelatihan keselamatan kerja dilakukan secara mandiri oleh pemilik tambak kepada pekerja | Menfasilitasi pelatihan keselamatan kerja sesuai dengan kondisi tambak |
|
|
|
|
| 4.4.2. | Pemantauan kecelakaan dan insiden, serta tindakan korektif. |  |  |  | Membuat form kejadian kecelakaan dan insiden, serta tindakan korektif. | Form kecelakaan dan insiden, serta tindakan korektif tersedia di kelompok | Done |
|
| 4.4.3. | **C**akupan biaya medis |  |  |  | N/A | Pengobatan akibat kecelakaan kerja akan ditanggung oleh pemilik tambak. | Rekomendasi untuk penyediaan kartu BPJS. |
|
|
| **Kriteria 4.5: Upah minimum dan adil atau "upah layak"** | |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Tingkat upah minimum yang berlaku sesuai deskripsi spesifik pekerjaan / tugas mereka. |  |  |  | Memiliki daftar upah minimum yang berlaku di Pinrang | Pekerja memperoleh 10 persen dari hasil tambak.  Terdapat nota-nota pembagian hasil tambak.  Ketentuan UMR tidak berlaku karena pekerja tidak sepenuhnya bekerja di tambak. Pekerja diberikan kebebasan untuk mengusahakan hal lain ketika tidak ada kegiatan pertambakan.  Terdapat timesheet mitra kerja tambak | Done |
|
|
| 4.5.2 | Pekerja tetap mendapat upah yang adil. Gaji yang diterima pekerja jika belum mencapai tingkat "upah yang adil", meningkat secara bertahap sehingga mencukupi untuk kebutuhan dasar seorang pekerja, ditambah pendapatan tambahan yang memungkinkan untuk tabungan dan / atau dana pensiun. |  |  |  | Memiliki daftar upah minimum yang berlaku di Pinrang | Upah berdasarkan ketentuan pembagian hasil daerah setempat, yaitu 10 persen dari hasil tambak.  Ketentuan UMR tidak berlaku karena pekerja tidak sepenuhnya bekerja di tambak. Pekerja diberikan kebebasan untuk mengusahakan hal lain ketika tidak ada kegiatan pertambakan.  Terdapat timesheet mitra kerja tambak. | Done |
|
|
|
| 4.5.3. | Hukuman melalui pelanggaran hak atau upah pekerja. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4. | Ada mekanisme untuk menetapkan gaji dan tunjangan (termasuk, kombinasi gaji dan pengaturan pembagian hasil saat di panen). |  |  |  | Memiliki daftar upah minimum yang berlaku di Pinrang | Upah berdasarkan ketentuan pembagian hasil daerah setempat, yaitu 10 persen dari hasil tambak.  Ketentuan UMR tidak berlaku karena pekerja tidak sepenuhnya bekerja di tambak. Pekerja diberikan kebebasan untuk mengusahakan hal lain ketika tidak ada kegiatan pertambakan.  Terdapat timesheet. | Done |
|
|
|
|
|
| 4.5.5. | Skema kontrak kerja berulang yang dilakukan untuk menghindari kontrak kerja penuh (tetap), dan akses pekerja untuk mendapatkan remunerasi yang adil. |  |  |  | Memiliki daftar upah minimum yang berlaku di Pinrang | Terdapat dokumen Upah Minimum Kabupaten Pinrang. | Done |
|
| **Kriteria 4.6: Akses terhadap kebebasan ber-asosiasi dan hak untuk penawaran kolektif** | |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Persentase pekerja dengan akses ke serikat pekerja, organisasi pekerja, dan / atau memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan kemampuan untuk berunding bersama [75] atau untuk memiliki akses ke perwakilan yang dipilih oleh pekerja tanpa campur tangan manajemen. |  |  |  | N/A | Tidak ada serikat karena dikerjakan sendiri.  Terdapat pertemuan rutin antara pekerja untuk membahas masalah-masalah tambak dan lingkungan. | Done |
|
|
| 4.6.2 | Anggota serikat atau organisasi pekerja tidak didiskriminasikan oleh majikan. |  |  |  | N/A | tidak ada serikat karena dikerjakan sendiri  terdapat pertemuan rutin antara pekerja untuk membahas masalah-masalah tambak dan lingkungan. | Done |
|
|
| **Kriteria: 4.7: Gangguan dan praktik disipliner dalam lingkungan kerja yang menyebabkan kerugian fisik sementara atau permanen dan/atau kerugian mental.** | |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Keadilan tindakan-tindakan disipliner karyawan |  |  |  | N/A | tidak ada tindakan disipliner terhadap pekerja tambak.  Telah ada kebijakan tambak terkait tidak melakukan tindak disipliner. | Done |
|
| 4.7.2. | Kebijakan dan prosedur disiplin yang adil dan transparan. |  |  |  | N/A | tidak ada tindakan disipliner terhadap pekerja tambak.  Telah ada kebijakan tambak terkait tidak melakukan tindak disipliner. | Done |
| 4.7.3. | Larangan pelecehan. |  |  |  | N/A | tidak ada tindakan disipliner terhadap pekerja tambak.  Telah ada kebijakan tambak terkait tidak melakukan tindak disipliner. | Done |
| **Kriteria 4.8. Kompensasi lembur dan jam kerja** | |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. | Jumlah maksimum jam kerja biasa: Delapan jam / hari atau 48 jam / minggu (rata-rata maksimum periode lebih dari 17 minggu) termasuk jam "stand-by"; dengan setidaknya satu hari penuh (termasuk dua malam) libur setiap tujuh hari. |  |  |  | N/A | Tidak berlaku karena pekerja diperbolehkan untuk meninggalkan tambak jika tidak ada pekerjaan di tambak. Skala kerja di tambak tradisional lebih sedikit. Selain itu, sejauh ini tidak pernah ada konsep lembur untuk pekerja tambak tradisional.  Terdapat timesheet mitra kerja tambak. | Done |
|
| 4.8.2. | Hak untuk meninggalkan tambak setelah selesai tugas melaksanakan pekerjaan sehari-hari. |  |  |  | N/A | Pekerja diperbolehkan untuk meninggalkan tambak jika tidak ada pekerjaan di tambak.  Terdapat timesheet mitra kerja tambak. | Done |
|
|
| 4.8.3. | Waktu libur yang merupakan hak karyawan, namun tetapi tidak diwajibkan untuk meninggalkan tambak, kecuali ada perjanjian kedua pihak, majikan dan karyawan, setuju bahwa hari libur tidak ditampung di tambak. |  |  |  | N/A | Tidak berlaku. Pekerja dapat beristirahat menyesuaikan dengan kondisi pemeliharaan udang dalam tambak.  Tidak ada konsep libur untuk pekerja tambak tradisional.  Terdapat timesheet mitra kerja tambak. | Done |
|
| 4.8.4. | Transport diberikan kepada pekerja (dalam kasus di mana lokasi peternakan terpencil) untuk memungkinkan pekerja untuk menikmati relaksasi/libur di rumah, dengan keluarga atau di tempat-tempat rekreasi yang mereka pilih. |  |  |  | N/A | Transport pekerja menggunakan motor pribadi mereka sendiri. Jarak rumah dengan tambak tidak begitu jauh. | Done |
|
| 4.8.5. | Lembur bersifat sukarela, dan tidak lebih dari 12 jam / minggu. |  |  |  | N/A | Tidak ada konsep lembur dalam kehidupan kerja tambak tradisional.  Terdapat timesheet mitra kerja tambak. | Done |
|
| 4.8.6. | Lembur bersifat sukarela, dan tidak lebih dari 12 jam / minggu. |  |  |  | N/A | Tidak ada konsep lembur dalam kehidupan kerja tambak tradisional.  Terdapat timesheet mitra kerja tambak. | Done |
|
|
| 4.8.7 | Hak untuk cuti hamil, termasuk istirahat harian atau pengurangan jam kerja untuk memenuhi kebutuhan perawatan anak. |  |  |  | N/A | Tidak berlaku, tidak ada pekerja perempuan. | Done |
| **Kriteria 4.9. Kontrak pekerja wajar dan transparan** | |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. | Indikator: Kontrak kerja kerja tidak dilakukan berulang-ulang, karena pemilik tambak menghindari kewajiban untuk memberikan hak sebagai karyawan tetap. |  |  |  | Kontrak kerja menyesuaikan dengan kebiasaan dan konsep pembagian hasil dalam budidaya udang tradisional. | Fasilitasi pembuatan kontrak kerja yang sesuai dengan kebiasaan dan konsep pembagian hasil dalam budidaya udang tradisional. | Penandatanganan perjanjian kerjasama antara petambak |
|
| 4.9.2. | Indikator: Semua pekerja memiliki izin yang sesuai dan berlaku untuk bekerja di negara itu. |  |  |  | N/A | Tidak berlaku karena pekerja merupakan masyarakat sekitar tambak.  Tambak yang dikelola adalah tambak tradisional yang tidak memerlukan izin kerja. | Done |
| 4.9.3. | Pekerja sepenuhnya menyadari kondisi kerja mereka dan menegaskan kesepakatan mereka (lisan atau tertulis). Kebijakan dan prosedur kerja tertulis yang diperlukan bila ada lebih dari lima pekerja yang dipekerjakan. |  |  |  | Adanya kesepakatan antara pemilik tambak dan pekerja tambak mengenai kesepakatan tugas petambak. | Secara umum, pekerja tambak memahami mekanisme kerja sesuai dengan kebiasaan setempat. | Done |
|
|
| 4.9.4. | Masa Kerja Percobaan ditetapkan dalam kontrak |  |  |  | N/A | Tidak ada masa kerja percobaan untuk petambak tradisional. | Done |
|
| 4.9.5 | Dalam hal dilakukan sub-kontrak kerja oleh pihak ketiga, pemilik tambak harus memastikan bahwa undang-undang ketenagakerjaan, telah menghormati dan mentaati ketentuan jaminan sosial sesuai ketentuan ILO. |  |  |  | N/A | Tidak berlaku karena tidak ada sub kontrak. | Done |
| **Kriteria 4.10: Sistem pengelolaan pekerja yang wajar dan transparan** | |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. | Pemiliki tambak memastikan bahwa semua pekerja memiliki akses ke saluran komunikasi yang sesuai dengan manajer (pengelola tambak) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak buruh dan kondisi kerja. |  |  |  | N/A | Tidak berlaku karena pengelolaan tambak dilakukan secara tradisional dan manajemen pekerja masih skala tradisional. | Done |
|
|
|
|
|
| 4.10.2. | Manajemen (pengelola tambak) bertemu tenaga kerja setidaknya dua kali per tahun atas dasar agenda tertulis, serta ada catatan tertulis (notulen) pertemuan tersebut. |  |  |  | N/A | Tidak berlaku karena pengelolaan tambak dilakukan secara tradisional dan manajemen pekerja masih skala tradisional. | Done |
|
|
| 4.10.3. | Rencana kerja dengan penjadwalan waktu untuk mengatasi keluhan dan masalah |  |  |  | N/A | Keluhan tambak di atasi dengan mekanisme tradisional, melalui pertemuan antara pekerja dan pimpinan pekerja tambak. | Done |
|
|
|
| 4.10.4 | Persentase keluhan yang diselesaikan dalam waktu tiga bulan setelah diterima. |  |  |  | N/A | Tidak ada keluhan pekerja tambak dalam tiga bulan terakhir. | Done |
|
| **4.11: Kondisi hidup pekerja yang tinggal di tambak** | |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1. | Kondisi hidup bagi pekerja yang ditampung di tambak, layak dan aman |  |  |  | N/A | Pekerja tinggal di rumahnya masing – masing. | Done |
|
|
|
| 4.11.2. | Fasilitas yang memadai bagi perempuan. |  |  |  | N/A | Tidak ada pekerja perempuan. | Done |
| **PRINSIP 5. KELOLA KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN UDANG DENGAN TINDAKAN YANG BERTANGGUNGJAWAB** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kriteria 5.1: Pencegahan penyakit** | | Kelompok | 🗸 |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Menyediakan dan menjaga rencana kesehatan operasional yang menangani: |  |  |  | 1.     SOP budidaya udang windu dan pencegahan dan monitoring penyakit.  2. Pelatihan BMP Budidaya udang windu.  Sosialisasi SOP pencegahan dan monitoring penyakit udang. | 1. Pengenalan SOP secara lebih detail lagi.  2. Pelatihan pengendalian penyakit diberikan pada saat pelatihan BMP Budidaya Udang Windu | Monitoring pelaksanaan SOP dan BMP Budidaya Udang Windu. |
| 1) patogen yang berasal dari lingkungan sekitarmemasuki tembak (contoh: kontrol predator dan vektor) |
| 2) Patogen yang menyebar dari tambak ke lingkungan sekitar (contoh:filtrasi/sterilisasi limbah, dan sampah seperti pengelolaan udang yang mati) |
| 3)Penyebaran patogen didalam tambak. Kritikal untuk menghindari kontaminasi silang, medeteksi dan mencegah kemunculan patogen, dan memonitor adanya tanda-tanda eksternal patologis dan hewan yang hampir mati. |
| 5.1.2. | Proses filtrasi air masuk untuk meminimasi masuknya patogen. Memastikan bahwa semua inlet tambak dan kolam memiliki jaring, saringan, layar atau penghalang dengan ukuran mata jaring yang sesuai. |  |  |  | Menggunakan saringan ganda untuk menyaring air | Semua anggota menggunkaan saringn ganda di pemasukan air  Pengecekan secara berkala kondisi jaring. | Done |
| 5.1.3. | Survival Rate tahunan rata-rata (SR)[86] , yang meliputi tiga sistem berbeda. |  |  |  | Pencatatan jumlah udang pada saat tebar dan pencatatan jumlah udang pada saat panen | Pencatatan jumlah udang pada saat tebar dan pencatatan jumlah udang pada saat panen tersedia  SR udang berkisar 5 – 15%, di bawah 25%. | - Menjalankan rekomendasi untuk peningkatan SR (survival rate), seperti penyediaan probiotik dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.  - Melengkapi dokumen pencatatan untuk perhitungan SR |
|
|
|
|
| 5.1.4. | Persentase postlarvae Specific Pathogen Free (SPF) [88] atau Specific Pathogen Resistant (SPR) [89] terhadap semua penyakit yang penting (misal apakah SPF-WSSV, atau SPF untuk beberapa virus) [90] . |  |  |  |  | Hasil uji laboratorium. Benur yang digunakan selama siklus tahun 2019, tidak mengandung virus WSSV. Uji SPF (negative). | Done |
|
|
|
|
|
|
| **5.2. Kontrol Predator** | |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Kelonggaran untuk mengontrol predator mematikan dari spesies yang dilindungi atau terancam punah, yang masuk daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN)[94], daftar nasional[95], atau daftar resmi lain[96] |  |  |  | - Tidak menggunakan alat yang menyebabkan kematian pada hewan-hewan yang dilindungi - Menunggu hasil B-EIA untuk hewan yang dilindungi | Surat pernyataan dari kelompok tidak menggunakan alat yang menyebabkan kematian pada hewan-hewan yang dilindungi | Done |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.2. | kelonggaran penggunaan tembakan atau bahan kimia terlarang untuk mengontrol predator. |  |  |  | - Tidak menggunakan alat yang menyebabkan kematian pada hewan-hewan yang dilindungi - Menunggu hasil B-EIA untuk hewan yang dilindungi | Surat pernyataan dari kelompok tidak menggunakan alat yang menyebabkan kematian pada hewan-hewan yang dilindungi | Done |
|
|
|
|
|
| 5.2.3. | jika kontrol predator yang mematikan digunakan, program monitoring harus ada untuk mendokumentasikan jumlah kunjungan, jenis spesies, dan jumlah hewan. |  |  |  | - Tidak menggunakan alat yang menyebabkan kematian pada hewan-hewan yang dilindungi - Menunggu hasil B-EIA untuk hewan yang dilindungi | Surat pernyataan dari kelompok tidak menggunakan alat yang menyebabkan kematian pada hewan-hewan yang dilindungi | Done |
|
| **Kriteria 5.3. Pengelolaan dan perlakuan penyakit** | |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | kelonggaran penggunaan antibiotik atau pakan yang mengandung fungsi obat pada produk berlabel ASC. |  |  |  | N/A | Surat keterangan dari kelompok tidak menggunakan antibiotik atau bahan kimia dalam proses budidaya | Done |
|
|
| 5.3.2. | Kelonggaran penggunaan antibiotik yang dilarang berdasarkan daftar WHO, meskipun jika peraturan nasional membolehkan. |  |  |  | N/A | Surat keterangan dari kelompok tidak menggunakan antibiotik atau bahan kimia dalam proses budidaya | Done |
|
| 5.3.3. | Informasi penyimpanan dan penggunaan bahan kimia |  |  |  | N/A | Surat keterangan dari kelompok tidak menggunakan antibiotik atau bahan kimia dalam proses budidaya | Done |
|
|
|
| 5.3.4. | penggunaan bahan kimia secara benar oleh pekerja tambak. |  |  |  | N/A | Surat keterangan dari kelompok tidak menggunakan antibiotik atau bahan kimia dalam proses budidaya | Done |
|
|
| 5.3.5. | Kelonggaran penggunaan pestisida untuk mentreatment air yang dilarang atau dibatasi oleh Konvensi Rotterdam mengenai Prior Informed Consent (PIC), atau konvensi Stockholm tentang Persistent Organic Pollutant (POP) atau tergolong sangat berbahaya oleh WHO |  |  |  | N/A | Surat keterangan dari kelompok tidak menggunakan antibiotik atau bahan kimia dalam proses budidaya | Done |
|
|
|
| 5.3.6. | Kelonggaran pembuangan bahan kimia berbahaya tanpa proses netralisasi |  |  |  | N/A | Surat keterangan dari kelompok tidak menggunakan antibiotik atau bahan kimia dalam proses budidaya | Done |
|
|
|
| 5.3.7. | Penggunaan strain bakteri probiotik tidak termasuk penggunaan produk fermentasi untuk membibitkan sejumlah berikutnya. |  |  |  | N/A | Surat keterangan dari kelompok tidak menggunakan antibiotik atau bahan kimia dalam proses budidaya | Done |
| **PRINSIP 6. KELOLA ASAL INDUK, SELEKSI STOK DAN DAMPAK PENGELOLAAN STOK** | | | | | | | |
| **6.1. Keberadaan spesies udang eksotis atau diperkenalkan** | |  |  | 🗸 |  |  |  |
| 6.1.1 | Penggunaan spesies udang bukan asli setempat [104] |  |  |  | N/A | Induk berasal dari Alam | Done |
|
|
|
| 6.1.2. | Keberadaan tindakan pencegahan untuk mencegah pelepasan (escape) pada masa panen dan selama pemeliharaan termasuk |  |  |  | N/A | Induk berasal dari Alam | Done |
|
|
|
|
| 6.1.3. | Escapes dan tindakan yang diambil untuk mencegah kejadian berulang |  |  |  | N/A | Induk berasal dari Alam | Done |
| **Kriteria 6.2. Sumber/asal PL atau induk** | |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | PL dan induk memiliki status bebas penyakit yang memadai dan sumber/asalnya memenuhi panduan importasi regional, nasional dan internasional (contoh. OIE, ICES) |  |  |  | Memastikan PL dan induk memiliki status bebas penyakit. | Surat keterangan bebas penyakit dari hatchery | Meminta secara regular surat keterangan bebas penyakit dari hatchery. |
|
|
|
|
| 6.2.2. | Persentasi PL total dari hacheri tertutup (yaitu induk yang dibudidayakan di tambak) |  |  |  | N/A | Induk berasal dari Alam  Benur dari hatchery. | Done |
|
|
| 6.2.3. | Sumber/asal induk tangkapan alam |  |  |  | Sumber induk berasal dari Perlak dan dari tangkapan alam. | Terdapat data SPF untuk benur BBU suppa. | Memperoleh keterangan dari hatchery sumber benur (yaitu BBU) dan BBAP Takalar. |
|
|
| 6.2.4. | Kelonggaran untuk PL tangkapan alam selain aliran arus alami kedalam kolam. |  |  |  | Tidak menggunakan benur dari Alam | terdapat keterangan dari kelompok tidak menggunakan benur alam tersedia | Done |
|
| 6.3.1 | Kelonggaran untuk budidaya udang transgenik (termasuk anakan dari udang yang secara genetis direncanakan) |  |  |  | Tidak menggunakan Induk transgenik | Terdapat surat keterangan dari hatchery bahwa tidak menggunakan benur transgenic. | Done |
| **PRINSIP 7. MENGGUNAKAN SUMBER DAYA SECARA EFISIEN LINGKUNGAN DAN BERTANGGUNGJAWAB** | | | | | | | |
| **Kriteria 7.1 Keterlacakan material mentah dalam pakan** | |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Bukti keterlacakan dasar bahan-bahan pakan, termasuk sumber, spesies, negara asal dan metode penangkapan ditunjukkan oleh produser pakan |  |  |  | Tidak menggunakan pakan buatan/pabrik |  |  |
| 7.1.2 | Menunjukkan rantai pertanggungjawaban dan keterlacakan produk perikanan dalam pakan melalui anggota ISEAL atau skema sertifikasi yang mematuhi ISO 65 yang juga memperhitungkan Kode Tindakan Perikanan Bertanggungjawab (Code of Conduct for Responsible Fisheries) dari FAO |  |  |  |  |  |  |
|
| **7.2 Asal-usul bahan pakan akuatik dan darat** | |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1a | Kerangka waktu untuk mendapatkan 100% (keseimbangan massa) tepung ikan dan minyak ikan yang digunakan dalam pakan didapatkan dari perikanan yang tersertifikasi oleh anggota ISEAL penuh yang memiliki pedoman yang secara spesifik mempromosikan keberlanjutan ekologis perikanan pakan. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.b | Nilai FishSource [124] [125], untuk perikanan dari mana 80% dari tepung ikan dan minyak ikan berasal (lihat Appendix III, pasal 3 untuk penjelasan penilaian FishSource) |  |  |  |  |  |  |
| a. untuk Kriteria Fishsource 4 (penilaian biomassa pemijahan) |
| b. untuk Kriteria Fishsource 1, 2, 3, 5 |
| 7.2.2 | Persentase bahan non-laut dari sumber-sumber yang tersertifikasi oleh skema sertifikasi anggota ISEAL yang membahas keberlanjutan lingkungan dan sosial |  |  |  |  |  |  |
| **7.3: Penggunaan bahan modifikasi genetik (GM) dalam pakan** | |  |  |  |  |  |  |
| **7.3.1** | Pakan yang mengandung bahan yang mengalami modifikasi genetik (GM) HANYA bila informasi mengenai penggunaan bahan-bahan GM dalam pakan udang dibuat tersedia secara mudah kepada pengecer dan konsumen akhir, termasuk: |  |  |  |  |  |  |
| a. Pengungkapan laporan audit bila bahan-bahan organisme modifikasi genetik (GMO) digunakan dalam pakan yang diberikan kepada udang |
| b. Pengungkapan bila bahan-bahan GMO digunakan kepada udang yang menerima sertifikasi ASC dalam rantai penyediaannya hingga tingkat pengecer. Pengungkapan penuh terhadap laporan auditor yang telah direvisi diterbitkan di dalam database yang mudah diakses di situs internet ASC. Database ini harus dibuat tersedia berdasarkan permintaan dari pengecer dan konsumen. |
| c. Penggunaan alat komunikasi yang paling mencukupi, cepat, dan mudah digunakan untuk memberi informasi kepada pengecer mengenai semua produk yang tersertifikasi |
| 7.3.2 | Daftar (Catatan Kaki) bahan-bahan pakan tidak mengandung GMO |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 | Keterlacakan pakan non-GMO (organisme modifikasi genetik) oleh produsen pakan dan oleh tambak |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.4 | Sampel diambil secara acak oleh auditor dan pengujian PCR hasilnya negatif |  |  |  |  |  |  |
| **7.4: Penggunaan ikan liar secara efisien untuk tepung ikan dan minyak ikan** | |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Rasio Ekuivalen Ikan Pakan (Feed Fish Equivalence Ratio – FFER) [137] |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2a | Rasio Konversi Ekonomi Pakan (Economic Feed Conversion Ratio – eFCR) |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2b | Efisiensi Retensi Protein (Protein Retention Efficiency - PRE) |  |  |  |  |  |  |
| **7.5: Kandungan kontaminan dalam limbah** | |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Jumlah nitrogen (Total N) yang dilepaskan dari sistem budidaya per ton udang yang diproduksi |  |  |  | Pemakaian Pupuk Urea pada awal adalah dengan luas lahan 10 ha 250 kg, dan selama pemeliharaan untuk perangsang 25 kg/3 bulan sehingga total input N 24,15 gram/ton udang/tahun. Sehingga, penggunaan pupuk tambak tersebut kurang dari 32.4 kg Nitrogen per ton udang untuk P. monodon. | Penggunaan pupuk tambak kurang dari 32.4 kg nitrogen perton udang untuk P. Monodon.  Terdapat data hasil Analisa kualitas air. | Memastikan penggunaan pupuk tambak kurang dari 32.4 kg nitrogen perton udang untuk P. Monodon. |
| Requirement: |  |  |
| < 25.2 kg Total N /ton udang untuk L. vannamei. |  |  |
| < 32.4 kg/ ton udang untuk for P. monodon. |  |  |
| 7.5.2 | Jumlah fosfor (Total P) yang dilepaskan dari sistem budidaya per ton udang |  |  |  | pemakaian Pupuk TSP pada awal adalah dengan luas lahan 10 ha 250 kg, dan selama pemeliharaan untuk perangsang 25 kg/3 bulan sehingga otal input P 18,9 gram/ton udang/tahun. Sehingga dari penggunaan pupuk tersebut kurang dari 5.4 kg Nitrogen per ton udang untuk P. monodon. |  | Memastikan penggunaan pupuk kurang dari 5.4 kg Nitrogen per ton udang untuk P. monodon. |
| Pupuk tersebut kurang dari 5.4 kg Nitrogen per ton udang untuk P. monodon.  Terdapat data hasil kualitas air untuk P total. |
|  |
| 7.5.3 | Penanganan dan pembuangan lumpur dan sedimen dari kolam dan kanal yang benar |  |  |  |  | Belum ada pembuangan sedimen basah ke lahan basah umum. | Memastikan tidak ada pembuangan sedimen ke lahan basah umum. |
| Monitoring penanganan dan pembuangan lumpur dan sedimen dari kolam dan kanal yang benar.  SOP penanganan dan pembuangan lumpur. |
|  |
| 7.5.4 | Penanganan air buangan dari kolam teraerasi/ kolam IPAL |  |  |  | Monitoring penanganan air buangan.  Tambak merupakan tambak tradisional yang tidak menggunakan pakan buatan. Sehingga limbah minim dan tidak dibutuhkan kolam IPAL. | Penanganan limbah cair. Limbah cair tidak begitu banyak, sehingga belum ada mekanisme penanganan limbah cair. | Done |
| 7.5.5 | Persentase perubahan oksigen terlarut (DO) relatif pada DO saturasi pada perairan laut yang berjarak 200m dari titik buangan dari areal pertambakan (pada suhu dan salinitas tertentu) |  |  |  | Tersedianya ata persentasi perubahan terlarut (DO) relatif pada DO saturasi pada perairan laut yang berjarak 200m dari titik buangan dari areal pertambakan (pada suhu dan salinitas tertentu) | Tersedia data DO perairan dalam beberapa bulan. | Memastikan tersedianya pendataan DO tambak dan saluran air tambak. |
| **7.6. Efisiensi energi** | |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Konsumsi energi (142) oleh sumber (143) selama periode 12 bulan |  |  |  |  | perhitungan energy lengkap. Penggunaan energy hanya terbatas pada transportasi bolak balik petambak dari rumah ke tambak menggunakan motor. Tidak menggunakan listrik untuk operasionalitas tambak. | Done |
| Tersedianya data penggunaan energy selama priode 12 bulan. |
|  |
|  |
| 7.6.2. | Tuntutan energi kumulatif tahunan(megajoul/ton udang yang diproduksi) (144) selama 12 bulan |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **7.7. Penanganan dan Pembuangan bahan berbahaya dan sampah** | |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 | Penyimpanan yang aman dan Penanganan bahan-bahan kimia dan bahan berbahaya |  |  |  |  |  | Monitoring penanganan limbah dan bahan berbahaya di sekitar kawasan tambak. |
|  |  |
| Pembuatan SOP Penanganan bahan kimia dan bahan berbahaya | Telah terdapat SOP penanangan limbah. |
|  |  |
|  |  |
| 7.7.2. | Penanganan dan pembuangan sampah yang bertanggungjawab berdasarkan penilaian resiko dan kemungkinan daur ulang |  |  |  | Pembuatan SOP penanganan sampah. | Tersedia SOP penananganan sampah yang berada di lokasi tambak. | Monitoring pembuangan sampah yang bertanggungjawab. |